

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka.

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dianggap Peneliti relevan dengan penelitian peneliti. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya : Maria Elsiana Dhiu Sengga, Bunsaman Shafila dan Lestari Anggreani. Untuk memperjelas keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut: Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan pertama dilakukan oleh Maria Elsiana Dhiu Sengga tentang “Partisipasi Forum Perempuan Dalam Mengakses Dana Desa Untuk Pemenuhan Kebutuhan Ibu dan Anak Di Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang”<sup>1</sup>. Hasil penelitian menunjukkan 1. Aspek partisipasi sebagai kontribusi melalui empat indikator yaitu Forum Perempuan yang dilibatkan dalam proses pembangunan desa, mereka memperjuangkan hak perempuan karena melihat sejauh ini sepertinya terabaikan, dalam aspek ini semua memenuhi indikator. 2. Aspek partisipasi sebagai organisasi melalui empat indikator yakni Forum Perempuan mempunyai tugas dan fungsi struktur yang jelas, mempunyai tupoksi masing-masing, bekerja secara efektif dan efisien, dalam aspek ini semua memenuhi indikator. 3. Partisipasi forum perempuan melalui empat indikator yakni Forum Perempuan dalam melakukan segala kegiatan benar-benar

---

<sup>1</sup> Maria Elsiana Dhiu Sengga tentang “Partisipasi Forum Perempuan Dalam Mengakses Dana Desa Untuk Pemenuhan Kebutuhan Ibu dan Anak Di Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

bertanggungjawab dan laporan keuangannya sangat transparan, mengambil peran dalam proses pembangunan desa.

Peneliti terdahulu yang menjadi rujukan kedua dilakukan oleh Bunsaman Shafila (2018) tentang “Partisipasi Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Tentang Peranan Petugas K3L Perempuan Universitas Padjadjaran Jatinangor Zona : Rektorat)”<sup>2</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga K3L terbagi menjadi dua peran, yang pertama adalah peran perempuan dalam keluarga, di antaranya adalah peranan sebagai seorang ibu dan juga peranan sebagai pendamping suami. Yang kedua adalah peranan perempuan di luar keluarga yaitu sebagai pencari nafkah. Para perempuan ini bekerja untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Peneliti terdahulu yang menjadi rujukan ketiga dilakukan oleh Lestari Anggreani<sup>3</sup> (2013) tentang “Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus Di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus)”. Hasil penelitian menunjukkan 1. Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM mandiri perkotaan ditunjukkan dengan kehadiran mereka pada pertemuan yang terimplementasi dalam siklus kegiatan pemberdayaan PNPM mandiri perkotaan, yang ditunjukkan

---

<sup>2</sup> Shafia Mardiana Bunsaman, Partisipasi Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Tentang Peranan Petugas K3L Perempuan Universitas Padjadjaran Jatinangor Zona: Rektorat), Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, e ISSN : 2581-1126, p ISSN : 2442-448X Vol 5, No: 2 Hal: 146-157 Juli 2018.

<sup>3</sup> Anggraini Munggi Lestari, “Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus Di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus)”, Tim Pengendali (PNPM) Mandiri. Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial.

dalam bentuk mengajukan pertanyaan, usulan, kritik membuat pembukuan keuangan, mendata masyarakat miskin, membuat prosposal, melaksanakan pemantauan program, serta partisipasinya dalam tahap pelaksanaan kegiatan. 2. Melihat pada partisipasi sebagai tujuan yang mengungkapkan bahwa partisipasi perlu ditinjau secara lebih mendalam dari proses maupun aktivitas, dalam proses pemberdayaan ditemukan pula adanya faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorongnya adalah kesadaran perempuan untuk membangun desa, dukungan dari suami, serta adanya kesempatan bagi keterlibatan perempuan. Faktor penghambatnya adalah beban ganda yang dimiliki perempuan, waktu pelaksanaan kegiatan, serta kesulitan mengelola keuangan pinjaman bergulir. 3. Implikasi dari partisipasi perempuan adalah meningkatnya perempuan dari yang pasif menjadi aktif. Perempuan yang pada awalnya hanya sebagai penerima pasif pembangunan, kini setelah ikut berpartisipasi mereka menjadi lebih aktif.

Letak persamaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah fokus atau locus wilayah penelitian dimana peneliti lebih memfokuskan penelitian tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Partisipasi**

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian potensi dan masalah yang ada di masyarakat, pemilihan dan

pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi<sup>4</sup>.

Bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program atau proyek pembangunan yaitu partisipasi harta benda, partisipasi sosial, partisipasi uang, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Bentuk partisipasi yang nyata contohnya tenaga, keterampilan, dan uang, harta benda, sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi pengambilan keputusan, partisipasi sosial, partisipasi representatif, dan buah pikiran.

### **2.2.2 Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan**

Perempuan dalam pembangunan sangatlah diperlukan. Selain karena argumentasi normatif yang memperlihatkan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama, terdapat suatu kenyataan bahwa “Beban” yang kini dihadapi oleh kaum perempuan amatlah berat. Untuk itu perempuan hendaknya berpartisipasi secara strategis dalam proses pembangunan, agar kaum perempuan ikut memastikan arah gerak pembangunan, sehingga kaum perempuan mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia yang mulia.

Dengan keterlibatan perempuan, maka kepentingan kaum perempuan akan lebih tersalurkan dan lebih dari itu kebijakan-kebijakan yang akan muncul akan

---

<sup>4</sup> Abadi, Totok W, Nunung P, Budi G. (2014). “*Performance e-government* untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.” dalam *Kawistara*, Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Universitas Gadjah Mada, vol.4/3, hal. 237-248

mencerminkan suatu kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan *gender*.

Adapun partisipasi strategis yang dapat dijalankan oleh kaum perempuan dalam pembangunan meliputi :

- a. Partisipasi dalam merancang model pembangunan yang digerakan oleh suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan adil *gender*. Kaum perempuan dapat mendorong berkembangnya pandangan baru dan ukuran-ukuran baru, sehingga kaum perempuan tetap dilihat dalam kaca mata perempuan yang tidak bias *gender*.
- b. Partisipasi dalam proses politik, khususnya proses pengambilan keputusan politik yang dapat berimplikasi pada pembangunan. Dalam hal ini kaum perempuan sudah saatnya membangun keberanian untuk memasuki ranah politik, baik menjadi penggerak partai politik masuk ke parlemen, atau berjuang melalui posisi kepala daerah maupun di tingkat paling rendah yaitu organisasi desa.
- c. Partisipasi dalam proses sosial-ekonomi dan produksi, serta proses kemasyarakatan yang luas. Kaum perempuan dapat menjadi penggerak kebangkitan perekonomian desa yang lebih berkarakter, yakni perekonomian yang berbasis produksi, bukan konsumsi.

### **2.2.3 Pengarusutamaan *Gender***

Pengarusutamaan *gender* atau biasa disingkat dengan PUG merupakan strategi yang dicanangkan secara sistematis dan rasional untuk mewujudkan dan mencapai kesetaraan dan keadilan *gender* dalam berbagai aspek kehidupan

manusia seperti rumah tangga, masyarakat dan negara. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kebutuhan, aspirasi, pengalaman dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Tujuan PUG dalam Inpres tersebut adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi<sup>5</sup> :

**a. Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa**

Partisipasi perempuan merupakan bagian yang harus diikutsertakan dalam proses pengidentifikasian potensi dan masalah yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan perempuan dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Sedangkan perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta-fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan yang ingin dikehendaki atau yang diharapkan.

**b. Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program atau proyek pembangunan, yaitu partisipasi harta benda, partisipasi sosial, partisipasi uang, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

---

<sup>5</sup> Yunita Farah dan Monica Luluk Fauziah (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) 5 (2), September 2017, 217-228 ISSN 2338-445x (print), ISSN 2527-9246 (online), 10.21070/jkmp.v5i2.1314.

Bentuk partisipasi yang nyata contohnya tenaga, keterampilan, dan uang, harta benda.

**c. Partisipasi Perempuan dalam Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa**

Monitoring adalah kegiatan memantau dan mengawasi proses berjalannya sebuah kegiatan dalam hal ini kegiatan pembangunan desa. Kegiatan monitoring berlangsung selama kegiatan pembangunan berjalan dengan maksud untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama. Monitoring juga adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokusnya pada proses dan hasil.

Sedangkan evaluasi merupakan proses yang sistematis yang mempelajari kejadian, memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi yang harus dibuat dan saran perbaikan dan dilakukan secara berkesinambungan untuk suatu masalah. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai.

**2.2.4 Faktor-faktor yang menghambat partisipasi**

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program baik faktor internal maupun eksternal. Sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Menurut Angell bahwa

partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat, peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan



penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

### **2.2.5 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang *continue* dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu negara.

Suatu proses yang melibatkan masyarakat umum dikenal sebagai peran serta masyarakat. Partisipasi merupakan bentuk dari peran serta masyarakat dimana masyarakat turut serta dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan. Begitupun dengan partisipasi perempuan, yaitu adanya keterlibatan dalam proses pembangunan.

Berdasarkan pengertian partisipasi yang diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan adalah peran serta perempuan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, sehingga dengan partisipasi tersebut merupakan tanda tumbuh dan berkembangnya perempuan mandiri.

Terdapat tiga variabel utama yang perlu mendapat perhatian menyangkut partisipasi masyarakat, yaitu<sup>6</sup> :

- a. Adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat.
- b. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan, yaitu menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.
- c. Kegiatan tersebut sangat diperlukan adanya peran serta nyata dari seluruh anggota masyarakat.

Slamet Margono mengemukakan bahwa indikator keberhasilan pembangunan bisa diukur dari ada tidaknya partisipasi masyarakat. Agar tumbuh partisipasi didalam masyarakat ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu<sup>7</sup> :

- a. Adanya kesempatan untuk membangun kesempatan dalam pembangunan
- b. Adanya kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan itu.
- c. Adanya kemampuan untuk berpartisipasi.

### **2.2.6 Pembangunan**

Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Dari pendapat tersebut dapat dibedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya.

---

<sup>6</sup> Basita, Ginting Sugihen. 2007. *Pembangunan Masyarakat "Teori dan Implementasi di Era Otonomi Daerah"*. Bogor : CDI Press. Hal.151

<sup>7</sup> Slamet, Margono. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor : IPB Press. Hal 9

Untuk dapat memperkembangkan perubahan-perubahan itu ke arah keadaan yang dianggap lebih baik, seringkali perlu dipergunakan cara yang terencana. Diusahakan suatu kombinasi kegiatan-kegiatan yang diharapkan memperoleh hasil terbaik, penetapan prioritas mana yang perlu didahulukan, yang diharapkan akan memberikan efek dongkrak bagi pertumbuhan. Kesemuanya itu adalah pembangunan nasional secara berencana, adapun tingkatan-tingkatan kegiatan di dalam pembangunan nasional berencana yang dilakukan secara terus menerus.

Adanya keinginan-keinginan dasar didalam masyarakat yang menuntut pemuasan. Sumber-sumber dari keinginan-keinginan ini adalah kebutuhan dasar yang dirasakan.

- a. Perumusan konsiliasi dilakukan dalam proses politik dan dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan politik mengenai kehendak-kehendak negara.
- b. Perumusan dasar-dasar hukum bagi pelaksanaan keputusan politik. Hal ini penting bagi suatu negara hukum.
- c. Perumusan kebijaksanaan dan program-program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di dalam keputusan politik.
- d. Penyusunan program-program kerja, sistem, dan mekanisme pelaksanaan.
- e. Implementasi untuk merealisasikan pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana atau kebijaksanaan dan program-program pemerintah yang konsisten berdasar keputusan-keputusan politik.
- f. Penilaian dari pelaksanaan (*monitoring*) maupun dari hasil-hasil yang dicapai (evaluasi).

### 2.2.7 Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa<sup>8</sup>. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten<sup>9</sup>. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas yang merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju sejahtera, dan berkeadilan<sup>10</sup>. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.<sup>11</sup>

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

<sup>9</sup> Wahjudin, dalam Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal. 266-267

<sup>10</sup> Adisasmita, Rahardjo, (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta : Graha Ilmu, Hal. 3

<sup>11</sup> UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

melalui membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi.

#### **2.2.8 Tujuan Pembangunan Desa**

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut<sup>12</sup> :

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, dan
- d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

---

<sup>12</sup> Ibid, Hal. 262-263